

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN BAGIAN DARI BOEDEL PAILIT YANG STATUS SITA UMUMNYA TUMPANG TINDIH DENGAN SITA PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS

Darwin Hasugian

1587089

Agar terjaminnya perlindungan terhadap pembayaran utang-utang debitur maka di buatlah agunan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditor, dalam kotruksi ini disebut sebagai jaminan tambahan (*accessoir*), pemegang jaminan tersebut disebut sebagai kreditor separatis, kreditor separatis berhak untuk mengeksekusi benda objek jaminan tersebut dikala debitur wanprestasi atau diputus pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun persoalan timbul ketika proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis atau pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhambat disebabkan adanya sita pidana terhadap objek jaminan tersebut. Sita pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini akan merugikan kreditor separatis dan menghambat proses pemberesan boedel pailit

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekatan Undang-Undang kepailitan dan Hukum Acara Pidana dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah.

Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa status sita umum tetap melekat terhadap benda objek jaminan kreditor separatis yang disita pidana oleh penyidik, oleh sebab sita umum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Mengesampingkan sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana didasari oleh asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan asas *Lex Posterior derogate priori* dan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditor separatis, kreditor separatis mendapat perlindungan hukum dalam bentuk Preventif yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan pencoretan terhadap sita pidana, kemudian perlindungan hukum dalam bentuk Represif yaitu dengan mengajukan Gugatan lain-lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan atau Mengajukan Gugatan Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dengan debitur pailit sebagai pihak tergugat.

**Kata Kunci : Kreditor separatis, Sita Umum, Sita Pidana, Kepailitan, Boedel Pailit**

## ABSTRACT

### **POSITION OF OBJECT LAW GUARANTEE PART OF BOEDEL PAILITS WHICH STATUS IS GENERALLY PASSED BY OIL CRIMES RELATED TO PROTECTION ON SEPARATIC CREDITORS**

**Darwin Hasugian**  
**1587089**

The legal consequences of the object of guarantee of separatist creditors who are in general seizure status are executions carried out by separatist creditors as holders of collateral rights or remedies made by the curator as stipulated in Article 55 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations to Pay Debt, but the problem arises when the execution process carried out by separatist creditors or the settlement made by the curator is hampered due to the existence of a criminal seizure against the object of the guarantee. Criminal confiscation is carried out in the interests of proving a criminal act as stipulated in Article 16 of Act No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This will harm separatist creditors and hinder the bankruptcy process.

This research method uses normative descriptive analytical juridical research method based on the merging of primary, secondary and tertiary data collected based on litelatur studies, using the concept of bankruptcy law and Criminal Procedure Law approach in conducting research on this thesis and drawing a conclusion as answers to problem identification.

The results of the study presented this study, it was found that the status of the general seizure remained attached to objects of objects of guarantee of separatist creditors who were confiscated by the investigator, because of the general seizure stipulated in the Bankruptcy Law. by the principles of law in the formation of legislation that is using the principle of Lex Posterior derogate priori and the principle of lex specialis derogat legi generalis. In terms of legal protection against separatist creditors, separatist creditors receive legal protection in the form of Preventives which are regulated in Article 31 paragraph (1) and paragraph (2) of Bankruptcy Law namely by writing off criminal seizures, then legal protection in the form of Repressive by submitting Other claims are regulated in Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law or Submitting a Civil Lawsuit on the basis of an illegal act with the bankrupt debtor as the defendant.

**Keywords : Separatist creditor, General confiscation, confiscate Criminal, Bankruptcy, Boedel bankrupt.**

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Persetujuan Revisi.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II PENGATURAN TERHADAP HUKUM KEPAILITAN DAN KEDUDUKAN OBJEK JAMINAN DALAM KEPAILITAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Kepailitan Di Indonesia.....	33
B. Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	37
C. Pengaturan Hukum Terhadap Lembaga Jaminan di Indonesia.....	44
D. Akibat Hukum Terhadap Kepailitan Debitor.....	52

E. Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan.....	54
<b>BAB III Pengaturan Terhadap Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.....</b>	<b>58</b>
A. Pengertian Hukum Acara Pidana Beserta Ruang Lingkupnya.....	58
B. Pengaturan Terhadap Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	66
C. Benda yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	69
<b>BAB IV KEDUDUKAN HUKUM BOEDEL PAILIT YANG STATUS SITTA UMUMNYA TUMPANG TINDIH DENGAN SITTA PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Kedudukan hukum Objek Jaminan Yang Merupakan Bagian dari Boedel Pailit yang Status Sita Umumnya Tumpang Tindih Dengan Sita Pidana.	86
B. Perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hal disitanya objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit akibat tumpang tindihnya sita umum dengan sita pidana.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	114
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>116</b>